

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
Jl.May.Jen. Sutoyo -Cililitan- Jakarta Timur

Sumber : <i>Media Indonesia</i>	Hari/Tgl : <i>Kamis, 11 Juli 2024</i>	Hlm/Kol : <i>4/1-5</i>
Subjek : <i>KPK - PEMBERANTASAN</i>		Bidang : <i>HN</i>

Kegagalan KPK dan Masa Depan Institusi

Sudirman Said

Ketua Institut Harkat Negeri

*'DI dunia tipu-tipu
Kamu tempat aku bertumpu
Baik, jahat, abu-abu
Tapi warnamu putih untukku'
(Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu)*

BARU-BARU ini, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara II membuat pernyataan (pengakuan) bahwa pemberantasan korupsi telah gagal. Pernyataan itu seperti petir di siang bolong. Betapa tidak? Pernyataan itu diutarakan dalam forum resmi (parlemen); disampaikan oleh pimpinan KPK, yang artinya pernyataannya ialah pernyataan institusi; dan di dalam momen yang memang dimaksudkan untuk membahas hal terkait dengan pemberantasan korupsi. Publik mungkin tercengang beberapa saat dan bertanya-tanya: apa yang sesungguhnya terjadi?

Jika masalah tersebut ialah hal yang menjadi wilayah publik, membicarakannya dimungkinkan. Oleh sebab itu, pertanyaan lebih jauh bisa diajukan, tentu tetap dengan penuh kebijaksanaan, mengikuti garis yang dibuat sila keempat Pancasila. Pertanyaannya, apabila KPK gagal, siapa sebenarnya yang gagal? Atau di pundak siapa sebenarnya beban harusnya diletakkan dalam kerangka agenda pemberantasan korupsi?

Lebih jauh lagi, karena sekitar 100 hari lagi akan ada suksesi kepemimpinan nasional, apa yang paling utama dan paling mendasar diwariskan kepada kepemimpinan baru? Bagaimana cara publik memahami problematika ini?

Gagalnya sebuah agenda bangsa

Pernyataan institusi KPK tentang kegagalannya tidaklah sesederhana diucapkannya kata gagal. Mengapa? Pertama, karena pemberantasan korupsi merupakan (salah satu) agenda reformasi. Suatu agenda yang dimajukan ke depan, oleh karena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah sampai ke titik yang dipandang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Agenda pemberantasan korupsi harus dimaknai bukan sekadar ungkapan anti pada tindak pidana korupsi, melainkan juga agenda menyelamatkan masa depan bangsa.

Kedua, sebagai bangsa merdeka, tentu saja setiap masalah, seberat apa pun, harus ditempuh jalan keluarnya sendiri yang penyelesaiannya sepenuhnya bergantung pada bangsa sendiri. Singkatnya, tidak mungkin bangsa kita meminta bantuan kepada bangsa lain untuk mengatasi masalah yang dihadapi karena ketika institusi dikorupsi, artinya telah terjadi 'pelemahan' dari dalam. Untuk melakukan perbaikan, tidak mungkin diundang kekuatan luar kecuali oleh kemauan dan kekuatan kita sendiri.

Oleh sebab itulah, untuk membuat agenda bergerak, dibentuk suatu institusi baru yang bersifat *ad hoc* dengan maksud agar 'spirit' menyelamatkan masa depan bangsa, lewat pemberantasan korupsi, dapat dijalankan. Secara demikian, institusi baru dimaksud ialah tubuh dari aspirasi publik.

Dengan itu, perbaikan dari dalam masih dimungkinkan atau, jika boleh disederhanakan, institusi baru tersebut menjadi 'selang' bagi masuknya energi baru dan pribadi-pribadi pilihan yang dapat lebih leluasa melakukan perbaikan-perbaikan

yang dibutuhkan.

Ketiga, oleh karena itu, publik sebenarnya memiliki *concern* yang sangat tinggi. Dengan itu, posisi KPK pada awalnya ialah tumpuan harapan publik. Realitas itu tidak bisa dibaca sebagai kecintaan pada institusi baru tersebut, tetapi pada harapan terwujudnya agenda reformasi. Pada titik tersebut, harus diakui bahwa publik memiliki keterbatasan.

Oleh sebab itu pula, publik memiliki perhatian dan harapan pada siapa saja yang akan masuk wilayah publik. Harapan tertinggi sudah barang tentu pada kepemimpinan nasional. Hal itu menjelaskan mengapa dalam suksesi kepemimpinan nasional sikap terhadap institusi baru tersebut dan lebih luas lagi sikap pada agenda pemberantasan korupsi menjadi isu yang krusial.

Perhatian publik, bahkan perjuangan publik, dapat dirasakan sebagai hal yang benar-benar nyata ketika merespons upaya pelemahan KPK. Kita semua mengetahui bahwa tenaga utama menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi ialah generasi baru, angkatan muda, dan mahasiswa.

Dengan suatu kegeniusan dalam merumuskan keadaan, gerakan menyimpulkan masalah sebagai: reformasi dikorupsi. Suatu rumusan yang tidak hanya memperlihatkan buruknya keadaan, tapi juga langsung menunjukkan siapa yang paling bertanggung jawab atas gagalnya agenda bangsa untuk terwujud nyata.

Dukungan politik

Jika pemberantasan korupsi merupakan agenda bangsa, dapat dikatakan bahwa untuk mewujudkannya sangat dibutuhkan dukungan politik, baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit.

Tanpa adanya dukungan politik yang kuat, mustahil agenda dapat diwujudkan, dan lebih spesifik lagi, tidak mungkin institusi anak kandung dari reformasi dapat eksis terjaga, menjalankan kewajibannya dengan sepenuhnya mengacu pada spirit reformasi. Mudah diduga bahwa tanpa dukungan politik yang akan terjadi justru sebaliknya.

Memahami situasi yang ada, bisa dipahami bila hal-hal berikut ini tengah atau akan terjadi. Satu, melemahnya institusi atau bahkan gagalnya institusi menjalankan amanat reformasi—hal yang sudah dinyatakan oleh pimpinan KPK sendiri. Sebagian kita barangkali akan berpandangan bahwa pelemahan akan berakibat pada banyak aspek, antara lain independensi dan sumber daya. Independensi akan terkait dengan penanganan kasus-kasus sensitif dan berdampak, sedangkan sumber daya antara lain terkait personalia, pembiayaan, teknologi, dan berbagai aspek lainnya yang bersifat meningkatkan kemampuan institusi dalam melakukan perbaikan 'dari dalam'.

Dua, menurunnya kepercayaan publik. Akibat dari yang kesatu, membawa akibat yang lebih luas, yakni merosotnya dukungan publik. Jika pada masa sebelumnya publik memberikan seluruh perhatiannya, ketika ada intervensi kepada KPK, dukungan demikian besar. Publik tentu ingat kasus 'cicak vs buaya'. Kini, yang tergelar justru sebaliknya, institusi seperti tengah berhadapan dengan publik.

Langkah institusi berwajah ganda, pada satu sisi ialah langkah hukum, tetapi tidak jarang ada yang menganggapnya langkah politik, bahkan ada yang menafsirkan lebih jauh sebagai langkah kekuasaan. Amat berbahaya bila tindakan penegakan hukum dicampuradukkan dengan tindakan politik karena dengan serta-merta ia kehilangan energi untuk mewujudkan keadilan.

Tiga, turunan dari satu dan dua menjadi lebih kompleks lagi, yakni merosotnya kepercayaan publik pada aspek yang lebih luas. Suatu gejala meluasnya tindak pidana korupsi terus terjadi, terutama akibat ada persepsi bahwa hukum dikendalikan oleh politik dan kekuasaan sehingga dengan kedekatan politik seakan memiliki 'keleluasaan untuk melampaui hukum.

Situasi itu dapat ditafsirkan sebagai gejala makin merosotnya standar moral dalam tata kelola. Dalam situasi yang demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa cepat atau lambat pada akhirnya akan berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik itu sendiri. Hal-hal di atas seperti sedang berlomba memanas, yang satu bukannya mengendalikan atau mengeram yang lain, tetapi sebaliknya: saling menjadi pemicu dan pendorong satu sama lain.

Apa yang penting untuk menjadi perhatian publik ialah berlangsungnya perbaikan dari dalam, tetapi pada kenyataan yang kini berlangsung justru sebaliknya, yakni pelemahan atau dalam batas-batas tertentu, mungkin dapat disebut sebagai perusakan tata kelola. Minimnya dukungan politik terhadap penuntasan agenda reformasi tidak hanya membuat agenda tersebut gagal menjadi nyata, tetapi juga sebenarnya akan menimbulkan dampak yang lebih besar, yakni kerusakan tata kelola yang mengancam hidup berbangsa dan bernegara.

Masa depan

Sangat dimungkinkan adanya pertanyaan yang bersifat strategis. Mengapa pernyataan tentang realitas agenda pemberantasan korupsi muncul sekitar 100 hari menjelang suksesi kepemimpinan nasional? Apakah itu pesan kepada masa kini atau harapan pada masa depan? Atau bagi keduanya secara simultan, apa yang sebaiknya berkembang agar perbaikan tetap dimungkinkan pada masa depan.

Beberapa inovasi politik mungkin bisa dipertimbangkan. Pertama, polarisasi politik praktis harus diakhiri dan digantikan dengan kompetisi gagasan yang melampaui politik praktis. Segala pikiran yang sudah mulai berkemas ke 2029 sebaiknya dihindari karena dari sanalah polarisasi politik praktis akan terus berkembang. Pikiran warga bangsa akan sangat baik jika difasilitasi untuk muncul berlomba menemukan jalan terbaik dalam mengatasi problem kekinian dan tantangan masa depannya.

Kedua, perlunya kejelasan akan komitmen politik pada penuntasan agenda reformasi. Segala keraguan yang dapat membangkitkan delegitimasi perlu diatasi

dengan sikap jelas, apa yang akan dilakukan setelah otoritas formal dipegang. Memang pada gilirannya akan bergantung pada pilihan dan proses pembentukan tim karena dari sanalah akan jelas arah politik yang diambil. Apa pun itu, diluar proses internal, secara eksternal amat perlu dijaga kondisivitas demokrasi.

Ketiga, perlunya cubangkitkan kembali agenda reformasi tata kelola, merespons tantangan yang boleh jadi lebih kompleks jika dibandingkan dengan pasca-Reformasi 1998. Langkah itu tidak hanya membutuhkan komitmen politik, tetapi juga dukungan politik. Dukungan tidak hanya dari dalam, tapi juga dari luar, yakni suatu kombinasi dan kolaborasi yang kuat dan teguh.

Pada titik itulah pentingnya platform agar kerja sama politik tidak selalu dituntun oleh kepentingan pragmatik, tetapi juga suatu komitmen bagi masa depan bangsa. Dengan begitu, masa depan institusi akan lebih cerah dan meyakinkan. Dapat disuarakan kepada kepemimpinan nasional yang akan datang bahwa tugas berat di purdaknya bukan semata menata pemerintahan, melainkan membangun kembali tata kelola yang kian melemah yang bermakna menata kehidupan bernegara secara keseluruhan.

Ketiga hal itulah yang mungkin diharapkan publik pada hari-hari ke depan. Suatu tanda bahwa keadaan baru yang lebih baik akan datang.

Bukankah itu yang diharapkan dari sirkulasi kekuasaan sebagai buah dari proses demokrasi yang sehat? Sudah barang tentu yang tidak diharapkan ialah kondisi sebaliknya yang mana publik makin tidak percaya dan makin tidak ambil pusing atas apa yang berlangsung.

Sebagaimana dilukiskan Yura Yunita: dunia tipu-tipu makin berjaya. Kita tidak ingin senandung nyanyian itu diam-diam merata di dalam benak warga negara. Jika itu yang justru berlangsung, bukan tidak mungkin waktu akan membentuk jalan sendiri agar keadilan yang merupakan inti dari reformasi mendapatkan lintasan yang menyekinkan untuk bisa hadir nyata dalam hidup berbangsa dan bernegara.